

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PROVINSI SULAWESI UTARA 2015-2019



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PROVINSI SULAWESI UTARA 2015-2019



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA 2015-2019

ISBN	: 978-602-567-349-8
No Publikasi	: 71520.2007
Katalog BPS	: 4601008.71
Ukuran Buku	: A4
Jumlah Halaman	: vii + 38 halaman / <i>pages</i>
Naskah	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara
Gambar Kulit	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara
Penyunting	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara
Diterbitkan Oleh	: ©BPS Provinsi Sulawesi Utara
Dicetak oleh	: CV. Rempah
Sumber Gambar	: www.freepik.com

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerahNya sehingga Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 dapat diterbitkan. Publikasi ini juga menyajikan perkembangan skor IDI selama lima tahun terakhir yang dapat menunjukkan perubahan demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui peristiwa-peristiwa yang terekam dari berita-berita dan dokumen pemerintahan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyadarkan kita tentang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan keterbukaan penyelenggara pemerintahan.

Proses pengumpulan data untuk menyusun IDI dilakukan dengan cara *review* surat kabar, *review* dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam kepada organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan tokoh-tokoh terkait yang paham dengan peristiwa-peristiwa yang dialami masyarakat di Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data ini menjadi keistimewaan bagi IDI sebagai alat ukur demokrasi yang merangkum peristiwa yang terjadi selama periode Januari – Desember tahun 2019.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada semua pihak yang telah berperan serta dan mendukung segala aktivitas sehingga publikasi ini dapat disusun. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam menata pembangunan demokrasi dan politik Provinsi Sulawesi Utara. Besar harapan kita agar para pengambil keputusan/perencana semakin familiar dengan IDI dan menjadikannya sebagai ukuran dalam menilai demokrasi yang sedang dibangun di Sulawesi Utara.

Manado, November 2020
Kepala



Norma O.F. Regar S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
II Konsep dan Metodologi Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia	4
2.1 Konsep	4
2.2 Metodologi.....	5
2.2.1 Komponen Pengukuran	5
2.2.1.1 Aspek Kebebasan Sipil	5
2.2.1.2 Aspek Hak-Hak Politik.....	6
2.2.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi.....	7
2.2.2 Pengumpulan Data	11
2.2.2.1 Telaah Media dan Dokumen	11
2.2.2.2 <i>Focus Group Discussion</i>	12
2.2.2.3 Wawancara Mendalam	13
2.2.3 Menghitung Indeks Setiap Indikator, Variabel, dan Aspek.....	14
III Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Utara	16
3.1 Capaian Demokrasi Sulawesi Utara, 2015-2019	16
3.2 Perkembangan Aspek Demokrasi Sulawesi Utara, 2015-2019	17
3.2.1 Aspek Kebebasan Sipil	18
3.2.2 Aspek Hak-Hak Politik.....	19
3.2.3 Aspek Lembaga Demokrasi.....	19
3.3 Perkembangan Variabel Demokrasi Sulawesi Utara, 2015-2019	20
3.4 Perkembangan Skor Indikator Demokrasi Sulawesi Utara	27
IV Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia antarprovinsi di Indonesia, 2015-2019	30
4.1 Gambaran Umum Indeks Demokrasi Indonesia	30
4.2 Perbandingan IDI antarprovinsi	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aspek, Variabel, dan Indikator IDI	9
Tabel 3.1	Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Utara, 2015-2019	28
Tabel 4.1	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2015-2019.....	33
Tabel 4.2	Perkembangan IDI Sulawesi Utara Berdasarkan Variabel, 2015-2019	34

<https://sulut.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Alur Pelaksanaan Empat Metode Pengumpulan Data dalam Penyusunan IDI	14
Grafik 3.1	Perkembangan Demokrasi Sulawesi Utara, 2015-2019	16
Grafik 3.2	Perkembangan dan Kesenjangan antar Aspek IDI Sulawesi Utara, 2015-2019	17
Grafik 3.3	Perkembangan Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Sulawesi Utara, 2015-2019	21
Grafik 3.4	Perkembangan Variabel Kebebasan Berpendapat Sulawesi Utara, 2015-2019	22
Grafik 3.5	Perkembangan Variabel Kebebasan Berkeyakinan Sulawesi Utara, 2015-2019	22
Grafik 3.6	Perkembangan Variabel Kebebasan dari Diskriminasi Sulawesi Utara, 2015-2019	23
Grafik 3.7	Perkembangan Variabel Hak Memilih dan Dipilih Sulawesi Utara, 2015-2019	23
Grafik 3.8	Perkembangan Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Sulawesi Utara, 2015-2019	24
Grafik 3.9	Perkembangan Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Sulawesi Utara, 2015-2019	24
Grafik 3.10	Perkembangan Variabel Peran DPRD Sulawesi Utara, 2015-2019.....	25
Grafik 3.11	Perkembangan Variabel Peran Partai Politik Sulawesi Utara, 2015-2019 ..	25
Grafik 3.12	Perkembangan Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, 2015-2019	26
Grafik 3.13	Perkembangan Variabel Peran Peradilan yang Independen Sulawesi Utara, 2015-2019	26
Grafik 4.1	Perkembangan IDI Nasional, 2015-2019	30
Grafik 4.2	Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2015-2019.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, atau yang disebut pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perjalanan demokrasi di Indonesia telah berjalan selama empat periode, yaitu dimulai dari masa revolusi (1945-1950), dilanjutkan masa orde lama (1950-1965), kemudian masa orde baru (1966-1998), dan kini masa reformasi (1998-sekarang).

Sejak reformasi 1998, demokrasi Indonesia banyak mendapat sorotan baik dari akademisi maupun praktisi pembangunan. Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokratisasi dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999 dan amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia. Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dilakukan secara bersamaan. Berselang UU Politik dikeluarkan, diterbitkan pula UU Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah.

Searah dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, penguatan kedudukan dan fungsi DPRD di tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten/kota) juga dilakukan sehingga DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Anggota DPRD provinsi dipilih langsung melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah adalah bersama-sama dengan gubernur selaku kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda). Demikian, demokratisasi telah membawa perubahan politik baik di tingkat pusat dan daerah sekaligus menjadi sarana untuk membentuk system

politik demokratis yang memberikan perluasan hak kepada rakyat sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat dicegah. Peran masyarakat juga penting dalam memanfaatkan ruang publik demokrasi yang tercipta agar sesuai dengan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Dinamika demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan perlu ada ukuran kuantitatif, suatu angka yang dapat menggambarkan perkembangan demokrasi. Oleh karena itu, pada tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia mulai menghitung Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indeks komposit yang mengukur perilaku demokrasi dari empat unsur, yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat luas. Disamping itu, IDI dibangun berdasarkan ciri khas Indonesia dengan latar belakang perkembangan sosial politik di Indonesia.

Bagi akademisi, keberadaan data IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena menjadi lebih terukur dan dapat dibandingkan. Bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi, angka IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui langkah yang perlu diambil baik oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Sementara bagi pemerintah dan masyarakat provinsi, adanya IDI dapat menunjukkan kemajuan/kemunduran demokrasi di tingkat provinsi. Data-data indikator dalam IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan demokrasi dan perbaikan kualitas penyelenggaraan demokrasi. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah perbaikan sehingga skor indeks untuk setiap indikator bisa meningkat di masa mendatang.

1.2 RUANG LINGKUP DAN DATA YANG DIGUNAKAN

Ruang lingkup publikasi ini secara umum membahas perkembangan demokrasi di Sulawesi Utara periode lima tahun terakhir. Pada bagian akhir disajikan pula perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia level nasional dan antarprovinsi di Indonesia selama periode 2015-2019.

Data yang digunakan bersumber dari berita terkait kehidupan demokrasi yang terekam dari media yang terbit harian di Sulawesi Utara dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari institusi terkait. Untuk melengkapi data juga ditambahkan informasi dari tokoh-tokoh terpilih di Sulawesi Utara.

Penghitungan IDI 2019 merupakan yang terakhir untuk RPJMN 2015-2019. Kedepannya konsep dan metode IDI akan direvisi. Adanya pandemi Covid-19 membuat pengumpulan data IDI Sulut dikerjakan dengan kekhususan terutama pada proses pengumpulan data dari tokoh-tokoh terpilih.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Buku ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing memberikan penjelasan terhadap mekanisme pengumpulan data hingga analisis sederhana. Bab I menjelaskan latar belakang penyusunan, ruang lingkup, dan data yang digunakan serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang konsep dan metodologi penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia. Bab III membahas tentang perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia dari berbagai aspek, variabel, dan indikator di Sulawesi Utara tahun 2015-2019. Bab IV membahas Indeks Demokrasi Indonesia level nasional dan Sulawesi Utara diantara provinsi lainnya di Indonesia 2015-2019.

BAB II

KONSEP DAN METODOLOGI

2.1 KONSEP

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah pengukuran kondisi demokrasi yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, perumusan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya, IDI mempertimbangkan ciri khas persoalan Indonesia secara umum dan secara khusus di Sulawesi Utara.

Sedikitnya ada dua karakteristik utama dari praktik demokrasi, yaitu adanya perluasan peran masyarakat dan reformasi kelembagaan demokrasi yang dilakukan secara menyeluruh. Namun, perluasan peran masyarakat ini lebih banyak merefleksikan kontestasi politik dan reformasi kelembagaan juga belum banyak memberikan kontribusi terhadap pemenuhan janji demokrasi karena belum didukung oleh perilaku demokrasi yang inheren di kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Dengan mempertimbangkan aspek teoritis dan empiris, maka dibentuklah empat prinsip dasar penyusunan IDI. Pertama, IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di tingkat provinsi. Kedua, IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi secara umum bukan studi etnografi yang memberikan gambaran secara utuh dan lengkap mengenai demokrasi provinsi. Ketiga, IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan masyarakat, yaitu merekam kinerja kelembagaan demokrasi sekaligus perilaku demokrasi di pelaku demokrasi. Keempat, IDI bukan tujuan akhir melainkan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Untuk mencapai hal ini, IDI diharapkan dapat menjadi rujukan dalam berbagai kajian akademis maupun formula kebijakan dan program pembangunan politik.

2.2 METODOLOGI

2.2.1 KOMPONEN PENGUKURAN

Tantangan dalam penghitungan IDI adalah menerjemahkan dan merumuskan seluruh pertimbangan kerangka konseptual ke dalam konsep yang operasional. Ada dua implikasi dari tantangan ini, yaitu melakukan deduksi logis dari kerangka konseptual ke dalam aspek, variabel, dan indikator yang terukur dalam merumuskan metodologi.

Ada beberapa kriteria yang secara sistematis dipakai dalam pemilihan variabel dan indikator, yakni relevansi, signifikansi, dan ketersediaan data. Variabel dan indikator yang digunakan dalam IDI harus benar-benar relevan terhadap demokrasi yang hendak diukur, ada kontribusi yang signifikan terhadap kondisi demokrasi di provinsi, serta harus dipastikan bahwa data-data penyusun indikator tersedia. Indikator yang secara teoritik relevan tidak dapat digunakan bila datanya tidak tersedia sehingga ketersediaan data menjadi faktor yang sangat menentukan.

Dengan demikian, dalam menyusun IDI terdapat tiga aspek yang dijadikan sebagai objek kajian, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun, kedua aspek tersebut tidak mungkin dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya aspek kelembagaan demokrasi.

2.2.1.1 ASPEK KEBEBASAN SIPIL

Kebebasan sipil didefinisikan sebagai kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, dalam konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil diturunkan ke dalam sejumlah variabel, sbb:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan berbentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang, sedangkan berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah.
- 2) Kebebasan Berpendapat adalah kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya rintangan berupa tekanan fisik, psikis dan pembatasan.
- 3) Kebebasan Berkeyakinan, yaitu kebebasan individu untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan.
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi, yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, orang dengan HIV/Aids (ODHA), dan hambatan fisik.

Sementara menurut indikator, terdapat 10 indikator yang tercakup dalam Aspek Kebebasan Sipil, yaitu dua indikator pada variabel pertama dan kedua, dan masing-masing tiga indikator pada variabel ketiga dan keempat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

2.2.1.2 ASPEK HAK-HAK POLITIK

Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik diturunkan menjadi dua variabel, yaitu:

- 1) Hak Memilih dan Dipilih, yaitu hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik dan untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik.

2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, misalnya hak pilih dalam pemilu. Selain itu, keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari frekuensi keterlibatan baik secara individu maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti *hearing*, demonstrasi, mogok, dan sebagainya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui *press statement*, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari lima indikator pada variabel pertama dan dua indikator pada variabel kedua (lihat Tabel 2.1).

2.2.1.3 ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

Seperti dikemukakan pada ulasan sebelumnya, kebebasan sipil dan hak-hak politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga-lembaga demokrasi.

Untuk tujuan pengukuran IDI, Aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil yaitu pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh, antara lain: adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara.

2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah efektivitas pelaksanaan fungsi parlemen/DPRD dalam rangka konsolidasi demokrasi. Hal ini penting untuk dilihat, karena

parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Parlemen yang efektif, yakni yang memprioritaskan kepentingan masyarakat, diindikasikan oleh antara lain: adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi; berjalannya mekanisme *check and balance*; akuntabilitas politik yang tinggi; dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen.

3) Peran Partai Politik, suatu kelompok yang terorganisir dengan orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Terdapat beberapa fungsi dari partai politik, antara lain fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, fungsi komunikasi politik, fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik, dan fungsi sosialisasi politik.

4) Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah, yaitu keterbukaan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan transparansi dalam penentuan kebijakan dan anggaran.

5) Peradilan yang Independen adalah pelaksanaan *rule of law* yang bebas intervensi, penegakan hukum yang konsisten dan kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini penting karena supremasi hukum merupakan landasan demokrasi. Peradilan yang bebas dari intervensi birokrasi dan politik (dan cabang kekuasaan yang lainnya), serta penegakan hukum yang konsisten mengindikasikan bahwa supremasi hukum dijunjung tinggi. Pada tingkat indikator, terdapat 11 indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi, yaitu dua indikator pada variabel pertama, ketiga, keempat dan kelima, serta tiga indikator pada variabel kedua (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Aspek, Variabel, dan Indikator

NO	ASPEK-VARIABEL-INDIKATOR
ASPEK KEBEBASAN SIPIL	
Variabel I: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
Variabel II: Kebebasan Berpendapat	
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
Variabel III: Kebebasan Berkeyakinan	
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
Variabel IV: Kebebasan dari Diskriminasi	
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
ASPEK HAK-HAK POLITIK	
Variabel V: Hak Memilih dan Dipilih	
11	Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat

12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
14	Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi
Variabel VI: Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	
16	Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
17	Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI	
Variabel VII: Pemilu yang bebas dan adil	
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara
Variabel VIII: Peran DPRD	
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita
21	Jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
Variabel IX: Peran Partai Politik	
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
24	Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
Variabel XI: Peran Peradilan yang independen	
27	Keputusan hakim yang kontroversial
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Dengan demikian, komponen pembentuk IDI 2015-2019 terdiri atas tiga aspek yang dirinci ke dalam 11 variabel dan 28 indikator. Meskipun terjadi perubahan pada indikator

dalam variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, tapi dari sisi jumlah indikatornya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, atau dengan kata lain, jumlahnya masih tetap.

2.2.2 PENGUMPULAN DATA

Penyusunan IDI menggunakan metode triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang data yang didapat dengan metode yang lain. Ada empat metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: telaah media (analisis isi berita surat kabar), telaah dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam (in-depth Interview). Metode-metode ini dilakukan karena IDI sepenuhnya menyadari keterbatasan koran seperti kemungkinan adanya bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Oleh karena itu, untuk mengurangi bias yang muncul karena kelemahan-kelemahan dalam metode telaah koran inilah, maka FGD dan wawancara mendalam juga dilakukan.

2.2.2.1 TELAHAH MEDIA DAN DOKUMEN

Telaah media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Surat kabar atau koran digunakan sebagai sumber informasi yang paling relevan dalam merekam kehidupan daerah termasuk hal-hal terkait proses demokratisasi selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari.

Dalam konteks penyusunan IDI, diperlukan rumusan isu spesifik terkait aspek, variabel, hingga indikator penelitian dan menentukan surat kabar terkemuka di setiap provinsi. Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Manado Post untuk penghitungan IDI periode 2011-2014. Selain merupakan koran terkemuka di Sulawesi Utara, koran ini menyajikan berita seluruh kabupaten/kota. Namun sejak tahun 2015, Manado Post digantikan dengan Radar Manado. Selanjutnya Radar Manado Juga mengalami pergantian nama dengan Harian Manado.

Sementara, untuk jenis dokumen resmi yang digunakan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan DPRD, serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian, dan data pemilih.

2.2.2.2 FOCUS GROUP DISCUSSION

Kegiatan FGD memiliki peranan penting dalam upaya untuk meminimalkan bias informasi yang dijangkit melalui telaah media dan dokumen. Adapun tujuan FGD adalah untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui telaah media dan dokumen; melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI; menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui telaah media dan dokumen.

Kegiatan FGD IDI di Sulawesi Utara setiap tahunnya dilaksanakan setelah rangkaian 12 bulan telaah/koding koran dan dokumen dilengkapi. Pelaksanaan FGD IDI tidak dilakukan di lingkungan gedung kantor pemerintah untuk menjaga independensi informasi/data yang

diperoleh dari peserta bahkan menghindari intervensi yang kuat yang mungkin terjadi dari pihak pemerintah daerah. Berbeda dengan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya dimana peserta dikumpulkan di satu tempat, karena adanya pandemi Covid-19, maka kegiatan FGD IDI 2019 dilakukan melalui *zoom meeting* dengan tetap melakukan pembahasan mengenai hal-hal yang terkait indikator-indikator pengukuran IDI. Acara FGD IDI dipimpin oleh seorang fasilitator yang memandu yaitu dari BPS Provinsi Sulawesi Utara. Peserta yang diundang dan yang menghadiri adalah dari akademisi, media serta berbagai elemen organisasi masyarakat, pemerintah, bahkan pihak kepolisian, pertahanan (TNI) dan peradilan (kejaksaan). Semua peserta memberikan informasi sesuai keahliannya dan juga konfirmasi terhadap peristiwa yang mereka pahami.

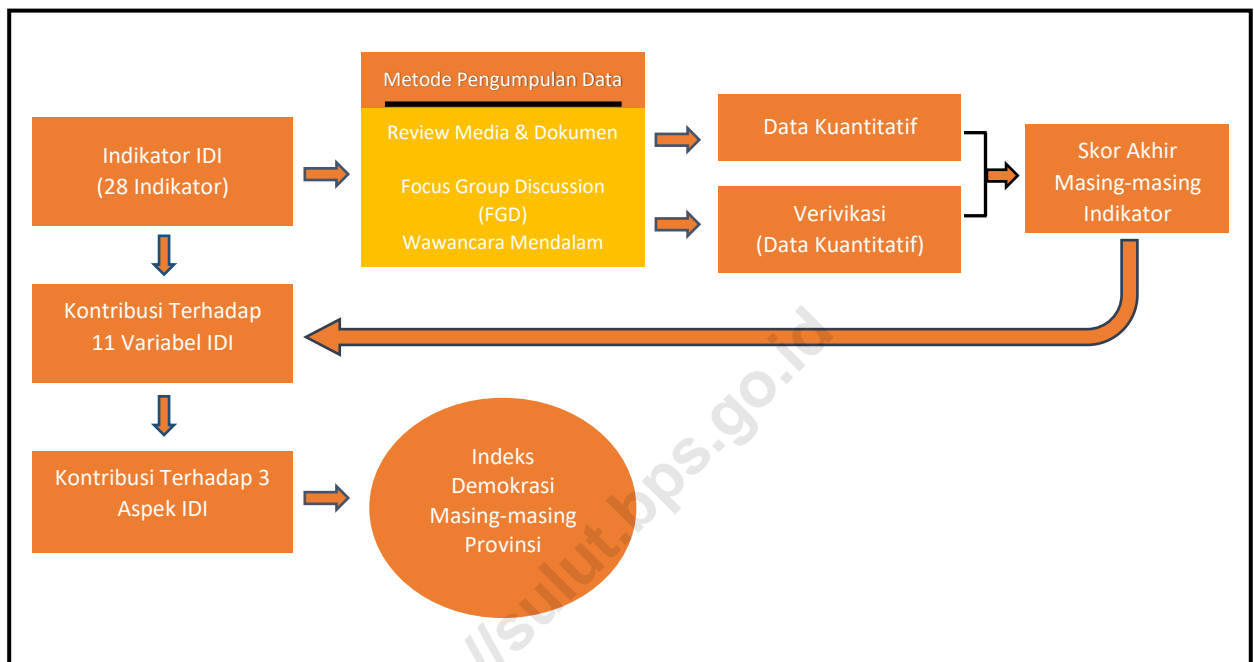
2.2.2.3 WAWANCARA MENDALAM

Pada konteks penyusunan IDI, wawancara mendalam dilakukan untuk memverifikasi informasi yang telah diperoleh melalui telaah media dan dokumen serta FGD. Wawancara mendalam lebih bersifat komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya sehingga kegiatan ini baru dilakukan setelah FGD guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD.

Dengan demikian, penghitungan indeks untuk masing-masing indikator IDI ditetapkan dengan menggunakan data kuantitatif melalui dua metode yang pertama (telaah media dan dokumen) serta data kualitatif yang diperoleh melalui dua metode berikutnya (FGD dan wawancara mendalam).

Tahapan wawancara mendalam di Sulawesi Utara dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh yang mengerti dengan permasalahan demokrasi di Sulawesi Utara, terutama mereka yang mengingat betul berbagai informasi dan peristiwa terkait indikator-indikator

dalam penghitungan IDI. Oleh karena itu, BPS Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengkajian sebelum akhirnya memutuskan tokoh yang akan diundang untuk dilakukan wawancara mendalam. Secara singkat, alur pelaksanaan empat metode pengumpulan data dalam penyusunan IDI dapat dilihat pada Grafik 2.1.



Grafik 2.1
Metode Pengumpulan Data Dalam Penyusunan IDI

2.2.3 MENGHITUNG INDEKS SETIAP INDIKATOR, VARIABEL DAN ASPEK

Indeks indikator diawali dari pengolahan data hasil telaah surat kabar dan dokumen menjadi skor data kuantitatif, yang kemudian dipadukan dengan data kualitatif hasil FGD dan wawancara mendalam. Selanjutnya, ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure (AHP)*. Penimbang ini menentukan kontribusi masing-masing indikator terhadap variabelnya.

Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Indeks aspek pada akhirnya menyumbang kepada Indeks Demokrasi Indonesia. Dari angka indeks yang dihasilkan, selanjutnya dapat diketahui kategori demokrasi

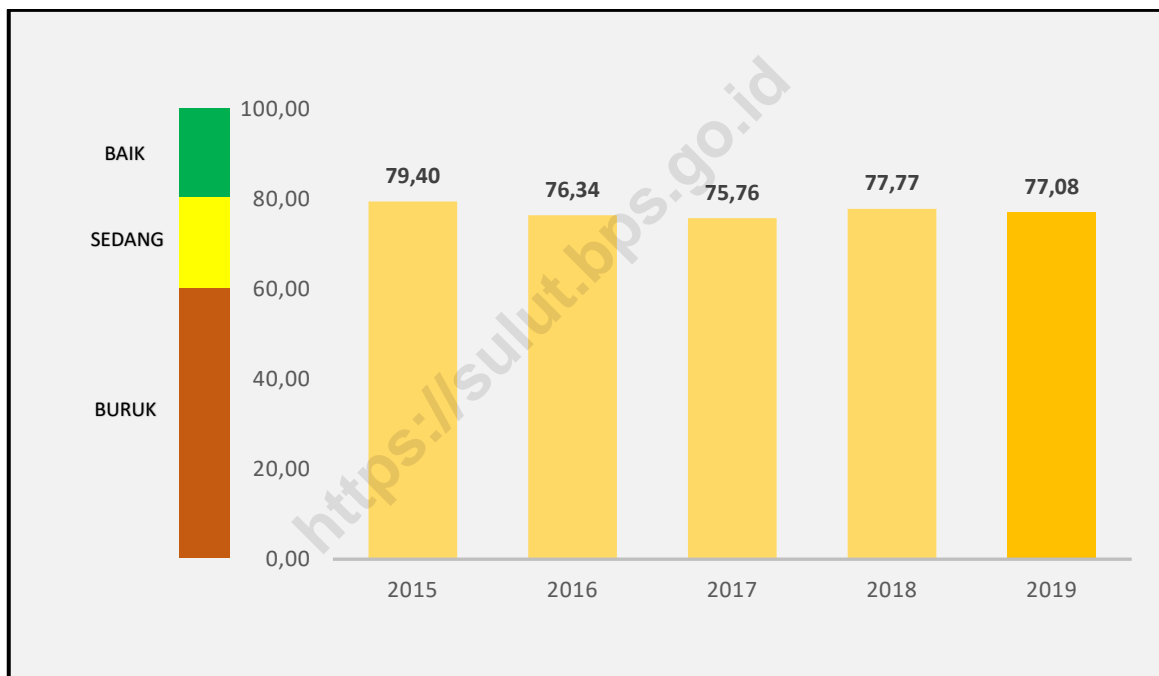
di suatu provinsi (rendah, menengah atau tinggi). Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks demokrasi yang dihasilkan, skala 1–100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu baik jika indeks > 80, sedang jika indeks 60 – 80, dan buruk jika indeks < 60.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan dinamika demokrasi. Sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas, IDI dirancang untuk peka terhadap perubahan kondisi demokrasi yang terekam oleh media ataupun tokoh-tokoh. IDI disusun secara cermat berdasarkan peristiwa sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Kondisi demokrasi suatu wilayah tidak hanya dibentuk dari satu aspek saja, tetapi banyak aspek, variabel dan indikator sesuai dengan kesepakatan penghitungan IDI. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas untuk mempertahankan kondisi suatu aspek dengan tidak mengabaikan aspek lainnya agar tidak terjadi ketimpangan.

BAB III PERKEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DI SULAWESI UTARA

3.1 CAPAIAN DEMOKRASI SULAWESI UTARA 2015-2019

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tahun 2015 merupakan capaian skor IDI terbaik di Sulawesi Utara. Skor IDI Sulawesi Utara tahun 2015 mencapai 79,40 dan termasuk dalam kategori 'sedang'. Namun setelah tahun 2015, skor IDI di Sulawesi Utara mengalami penurunan.

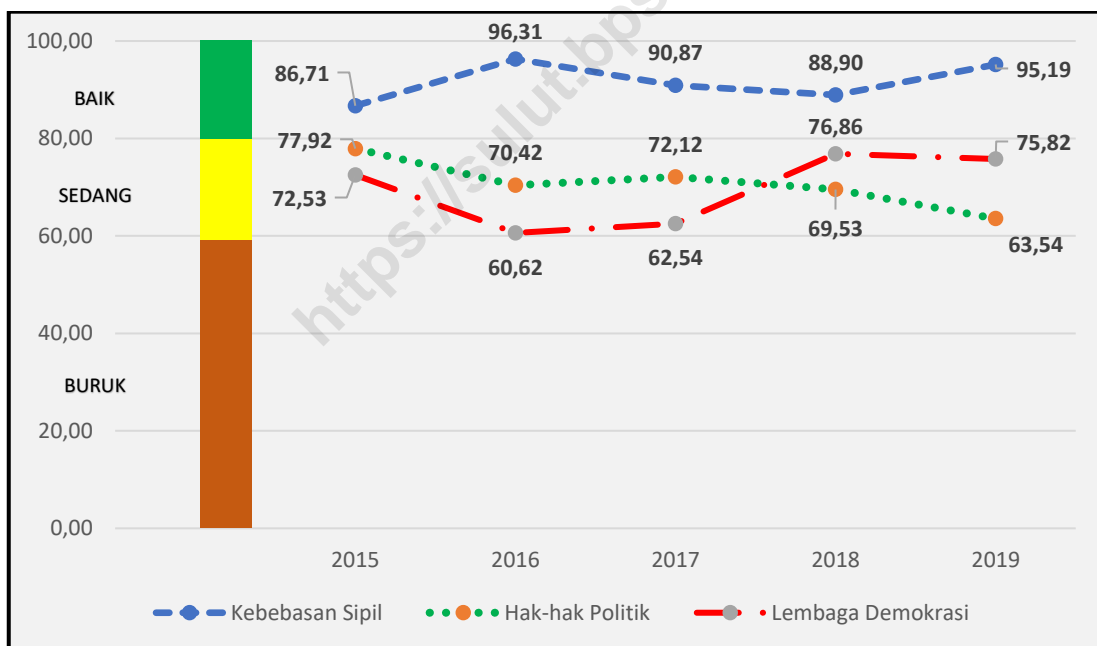


Grafik 3.1
Perkembangan IDI Sulawesi Utara, 2015-2019

Pada tahun 2019, skor IDI Sulawesi Utara adalah 77,08. Angka ini berada di atas angka IDI Nasional yang hanya sebesar 74,92. Angka IDI Sulawesi Utara ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang capaiannya sebesar 77,77. Meskipun mengalami perubahan, tingkat IDI Sulawesi Utara tersebut masih termasuk dalam kategori "sedang".

3.2 PERKEMBANGAN ASPEK DEMOKRASI SULAWESI UTARA 2015-2019

Grafik 3.2 menunjukkan bagaimana kecenderungan pergerakan atau perkembangan setiap aspek juga kualitas IDI Sulawesi Utara pada periode 2015-2019. Aspek-aspek IDI pada tahun 2019 memiliki skor 95,19 untuk aspek kebebasan sipil; 63,54 untuk aspek hak-hak politik, dan 75,82 untuk aspek lembaga demokrasi. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, aspek kebebasan sipil tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan skor aspek hak-hak politik dan aspek Lembaga demokrasi mengalami penurunan. Penurunan skor tertinggi terjadi pada aspek hak-hak politik yaitu turun sebesar 5,99 poin, sedangkan aspek lembaga demokrasi turun sebesar 1,04 poin. Sementara itu, aspek kebebasan sipil meningkat sebesar 6,29 poin.



Grafik 3.2
Perkembangan Aspek Demokrasi Sulawesi Utara, 2015-2019

Aspek Kebebasan Sipil di Sulawesi Utara tahun 2019 memiliki skor tertinggi diantara aspek lainnya, sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Aspek kebebasan sipil masuk dalam kategori baik, sedangkan aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi berada dalam kategori sedang.

Capaian aspek-aspek demokrasi Sulawesi Utara yang cukup bervariasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara aspek kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik. Ketimpangan ini pada gilirannya berpengaruh terhadap ragam dan kualitas kehidupan sosial dan politik di Sulawesi Utara. Kebebasan sipil yang tinggi, baik ruang kebebasannya maupun gairah untuk memanfaatkannya, telah mendorong partisipasi publik yang tinggi dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Partisipasi ini seringkali melahirkan banyak tuntutan yang pada umumnya sah, namun bergulir menjadi ekspresi yang justru anti-demokrasi karena kinerja lembaga demokrasi yang belum optimal.

3.2.1 ASPEK KEBEBASAN SIPIL

Selama periode tahun 2015 – 2019, nilai yang ditunjukkan berfluktuasi. Pada tahun 2016 aspek kebebasan sipil menyentuh angka 96,31. Angka tersebut merupakan yang tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Nilai aspek kebebasan sipil yang fluktuatif dapat dimaknai betapa sulitnya membangun demokrasi yang substansif, terutama dalam bidang pemenuhan hak-hak dasar kebebasan sipil masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Utara. Hak-hak yang dimaksud meliputi hak kebebasan berkumpul dan berserikat, hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak kebebasan dari semua bentuk diskriminasi.

Pada Tahun 2019, skor aspek kebebasan sipil yang terdiri dari empat variabel serta 10 indikator tercatat sebesar 95,19, naik 6,29 poin dibandingkan skor tahun 2018. Aspek ini

merupakan satu-satunya aspek yang mengalami peningkatan pada tahun 2019. Selain itu, selama kurun waktu lima tahun terakhir, aspek ini selalu berada dalam kategori baik.

Pemerintah dan masyarakat di Sulawesi Utara memiliki andil terhadap meningkatnya skor aspek kebebasan sipil. Kejadian yang berasal dari pemerintah adalah terkait ancaman atau penggunaan kekerasan dari aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, dan tindakan atau pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. Sementara kejadian yang berasal dari masyarakat adalah terkait ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

3.2.2 ASPEK HAK-HAK POLITIK

Skor aspek ini selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, aspek ini memiliki skor yaitu 77,92 dan masuk dalam kategori sedang. Namun setelah tahun 2015, skor aspek ini cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya (meskipun sempat meningkat di tahun 2017). Apabila dibandingkan skor aspek hak-hak politik tahun 2019 dengan 2015 maka telah terjadi penurunan skor hak-hak politik sebesar 14,38 poin selama lima tahun terakhir.

Skor aspek hak-hak politik pada tahun 2019 sebesar 63,54, turun 5,99 poin dibandingkan tahun 2018. Walaupun demikian, aspek hak-hak politik tahun 2019 masih tetap berada pada kategori sedang. Penurunan skor aspek ini disebabkan oleh turunnya skor variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Salah satu kejadian di Sulawesi Utara yang menyebabkan turunnya aspek ini di tahun 2019 adalah bertambahnya jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.3 ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

Skor aspek lembaga demokrasi dibangun dari lima variabel dan sebelas indikator. Selama periode tahun 2015-2019, skor aspek lembaga demokrasi menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Pada tahun 2015-2016 skor aspek demokrasi mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2016-2018 memiliki tren yang cenderung meningkat. Namun di tahun 2019, skor lembaga demokrasi kembali mengalami penurunan. Aspek ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai titik terendah pada tahun 2016 yaitu 60,62. Selain itu, selama lima tahun terakhir skor aspek lembaga demokrasi berada dalam kategori sedang.

Pada tahun 2019 aspek lembaga demokrasi bernilai 75,82, menurun 1,04 poin dari skor tahun 2018. Walaupun mengalami penurunan, aspek hak-hak politik tahun 2019 masih tetap berada pada kategori sedang. Penurunan aspek ini didorong oleh turunnya nilai variabel peran partai politik. Kejadian di Sulawesi Utara yang memberikan andil besar terhadap turunnya aspek ini di tahun 2019 adalah kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu.

3.3 PERKEMBANGAN VARIABEL DEMOKRASI SULAWESI UTARA 2015-2019

Pada tahun 2019, tujuh dari sebelas variabel penyusun IDI mengalami peningkatan nilai indeks, dua variabel mengalami penurunan, dan dua variabel lainnya nilainya tetap. Tujuh variabel mengalami peningkatan nilai, berarti lebih dari 50 persen variabel penyusun IDI Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Tujuh variabel yang mengalami peningkatan adalah variabel kebebasan berpendapat, variabel kebebasan berkeyakinan, variabel hak memilih dan dipilih, variabel pemilu yang bebas dan adil, variabel peran DPRD, variabel peran birokrasi pemerintah daerah, dan variabel peran peradilan yang independen. Dua variabel yang mempunyai nilai yang tetap adalah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, dan variabel kebebasan dari diskriminasi. Sementara dua variabel yang mengalami penurunan

nilai adalah variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, dan variabel peran partai politik. Walaupun hanya dua variabel yang mengalami penurunan, tetapi kedua variabel tersebut mampu menurunkan skor total IDI Sulawesi Utara.

Nilai variabel kebebasan peran partai politik mengalami penurunan yang cukup besar, dimana variabel ini mencapai nilai yang sempurna pada tahun sebelumnya. Nilai variabel ini turun dari nilai 100,00 pada tahun 2018 menjadi 61,43 pada tahun 2019. Pada tahun 2015 variabel ini masuk dalam kategori baik, periode 2016-2017 masuk dalam kategori buruk, dan tahun 2018 masuk dalam kategori baik, bahkan mencapai nilai sempurna. Namun berkurangnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh partai peserta pemilu di Sulawesi Utara menyebabkan berkurangnya peran partai politik sehingga nilainya menurun menjadi kategori sedang.

Terlepas dari skor absolutnya, pada tahun 2019, ada tujuh variabel yang bertengger pada kategori baik, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, pemilu yang bebas dan adil, dan peran peradilan yang independen. Variabel yang berada pada kategori sedang ada tiga, yaitu peran DPRD, peran partai politik, dan peran birokrasi pemerintah daerah. Sementara itu, ada satu variabel yang masih berkategori buruk, yaitu partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

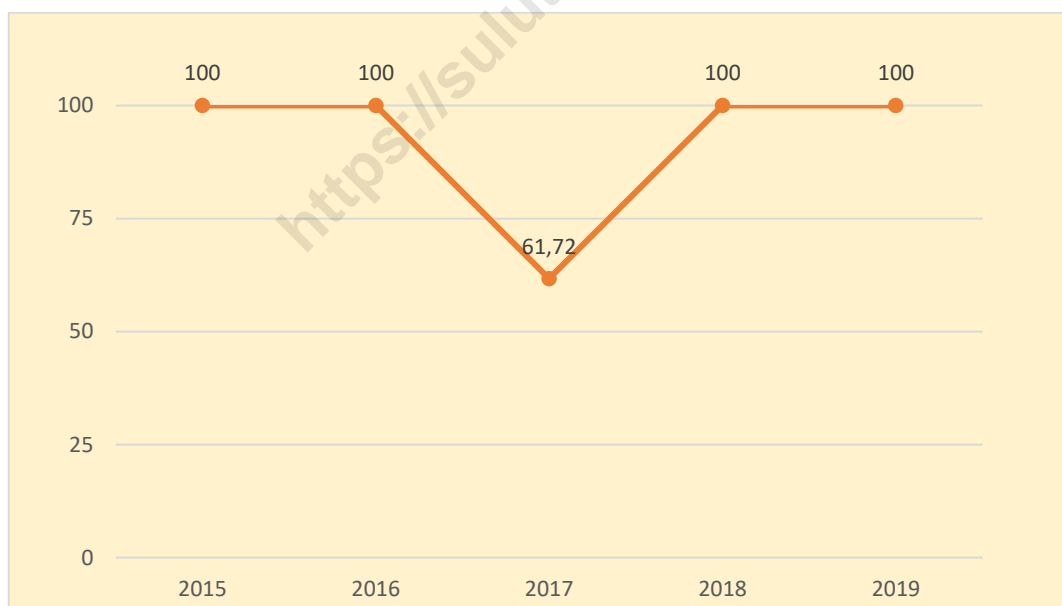
Nilai data pemilu pada 2019 yang digunakan pada IDI kali ini akurasi lebih baik daripada 2014 yang nilainya digunakan selama periode 2015-2018. Beberapa alasan data pemilu untuk IDI 2019 lebih baik adalah:

- 1) Memperoleh *raw* data dari Bawaslu RI (2014 hanya laporan cetak yang umum)
- 2) Ada proses klarifikasi dan masukan dari Bawaslu RI dan Provinsi (2014 tidak ada)
- 3) Aplikasi Sistem Pengawasan Bawaslu (Siwaslu) memungkinkan *coverage* yang meningkat dari seluruh provinsi (2014 belum efektif)

- 4) UU untuk pemilu 2019 memungkinkan pelanggaran lebih banyak diproses karena rentang waktunya 14 hari kerja (2014 hanya 5 hari)
- 5) Perubahan kewenangan yang memungkinkan Bawaslu bersidang dan memberi sanksi (2014 hanya rekomendasi)
- 6) Perubahan kelembagaan Bawaslu yang menjadi Lembaga tetap (2014 di kabupaten hanya Panwaslu yang masa tugasnya selesai tidak lama setelah pemilu)

Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Sulawesi Utara

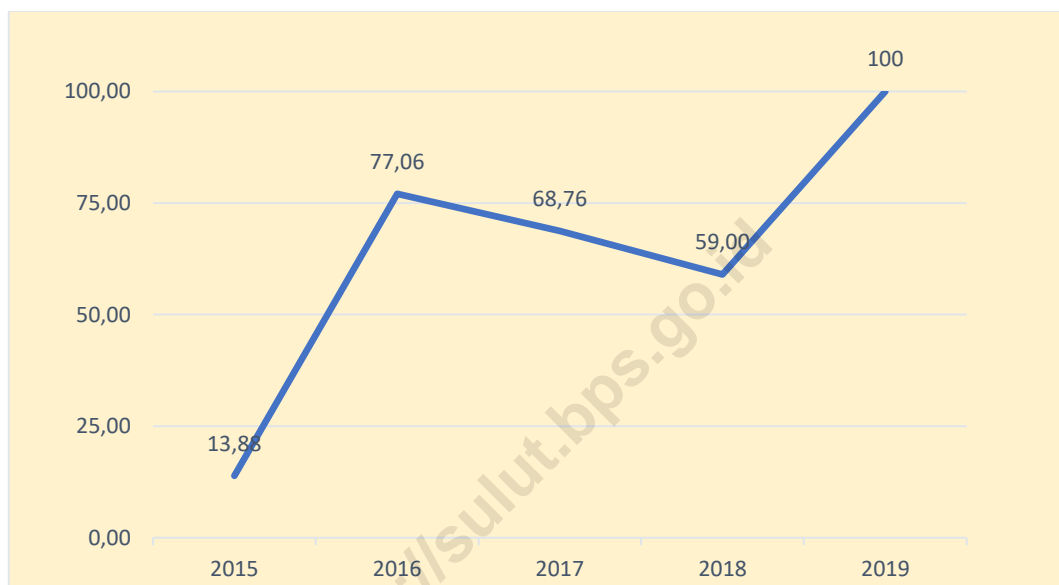
Pada tahun 2019, nilai variabel kebebasan berkumpul dan berserikat di Provinsi Sulawesi Utara tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018 dan memiliki nilai 100. Hal ini dikarenakan selama tahun 2018-2019 tidak ada kasus pelanggaran kebebasan berkumpul dan berserikat di Sulawesi Utara.



Grafik 3.3
Perkembangan Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Kebebasan Berpendapat

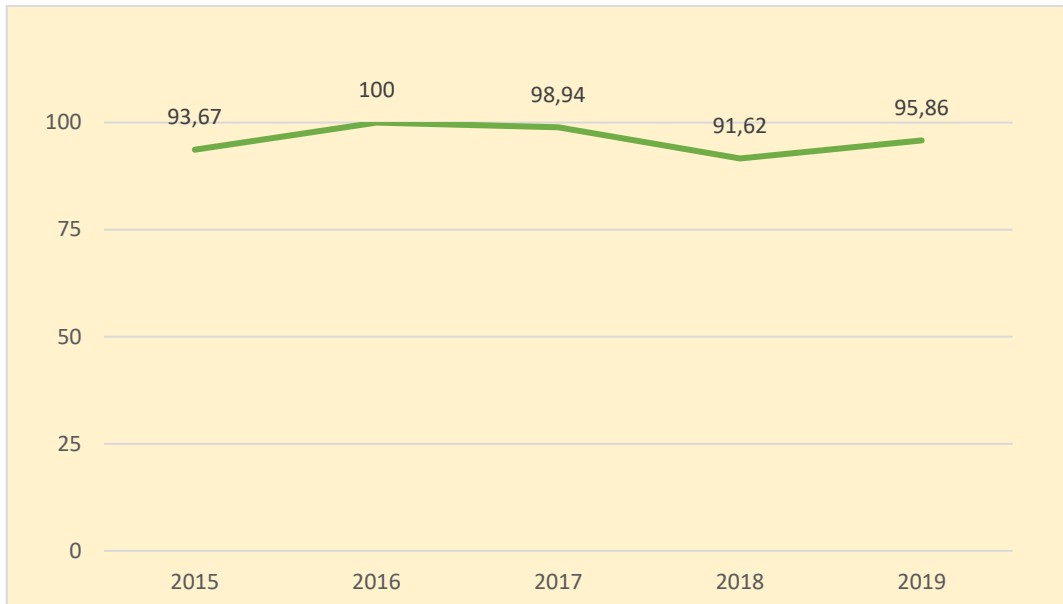
Pada tahun 2019, nilai variabel kebebasan berpendapat mengalami peningkatan dibandingkan nilai tahun 2018 yaitu dari 59,00 menjadi 100,00 atau berubah dari kategori buruk menjadi kategori baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 tidak ada kasus terkait pelanggaran kebebasan berpendapat di Sulawesi Utara.



Grafik 3.4
Perkembangan Variabel Kebebasan Berpendapat Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Kebebasan Berkeyakinan

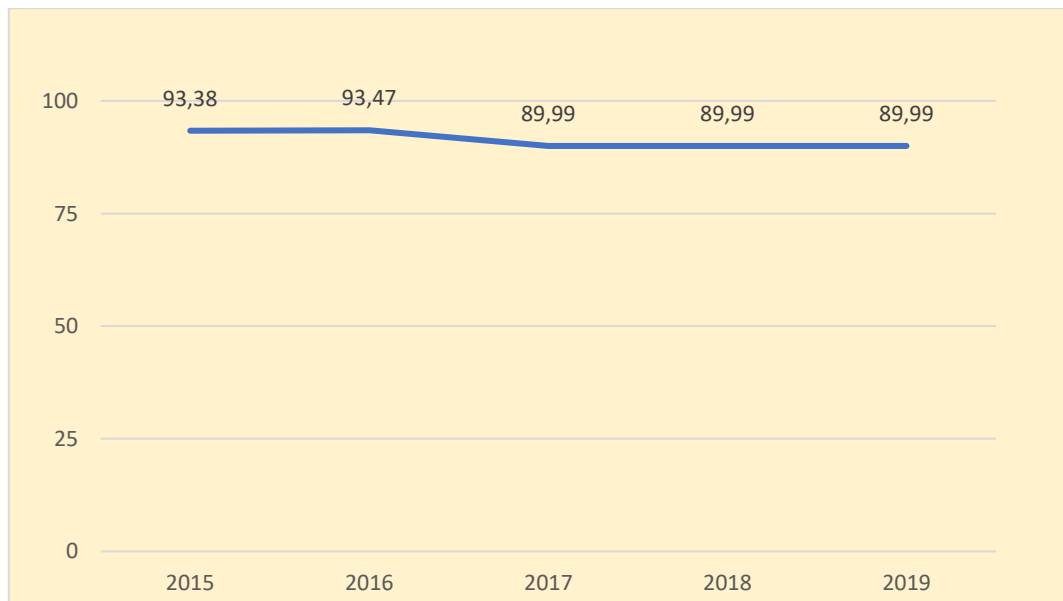
Nilai variabel kebebasan berkeyakinan di Sulawesi Utara cenderung tidak mengalami perubahan yang berarti. Sepanjang tahun 2015-2019, variabel kebebasan berkeyakinan di Sulawesi Utara terus berada dalam kategori baik. Pada tahun 2019, nilai kebebasan berkeyakinan di Sulawesi Utara adalah sebesar 95,86, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 91,62. Hal ini dikarenakan, berkurangnya kasus pelanggaran kebebasan berkeyakinan yang ada di Sulawesi Utara.



Grafik 3.5
Perkembangan Variabel Kebebasan Berkeyakinan Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Kebebasan dari Diskriminasi di Sulawesi Utara

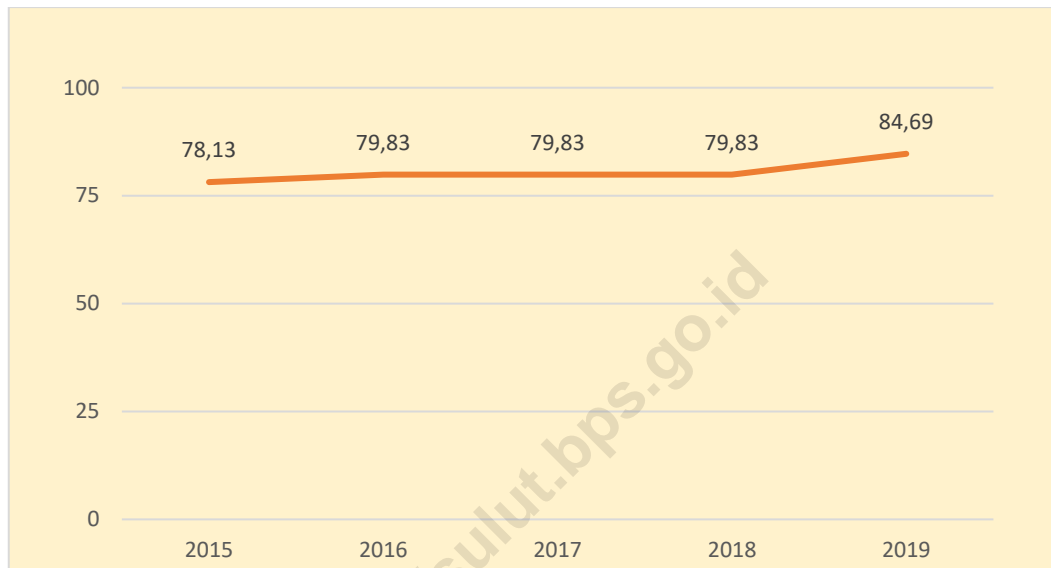
Nilai variabel kebebasan dari diskriminasi tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 89,99 atau masih berada dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus terkait pelanggaran kebebasan dari diskriminasi yang terjadi di tahun 2019 jumlahnya sama dengan kasus pada tahun 2018.



Grafik 3.6
Perkembangan Variabel Kebebasan dari Diskriminasi Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Hak Memilih dan Dipilih

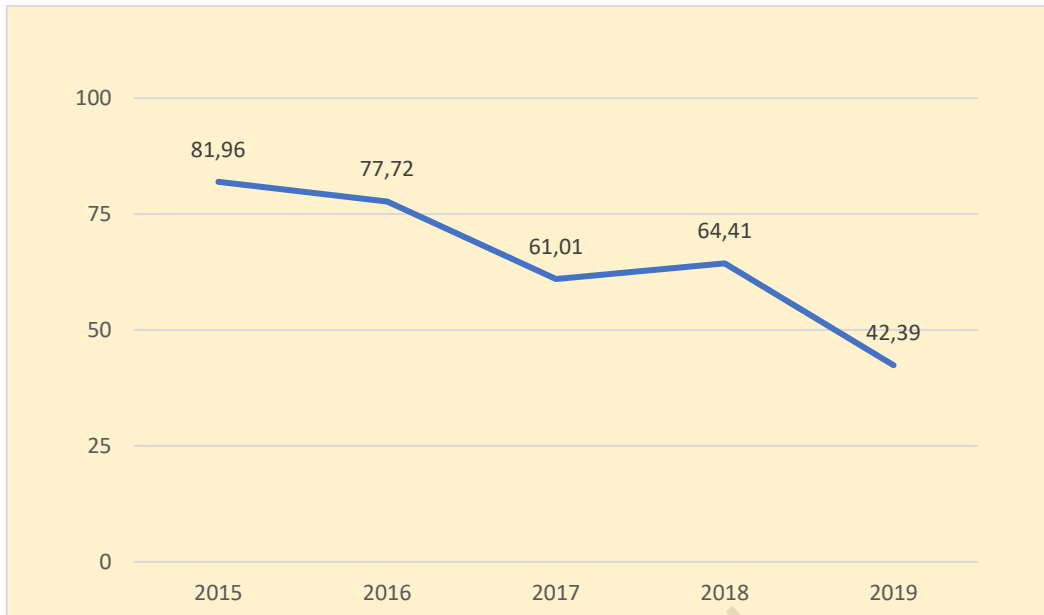
Dibandingkan dengan tahun 2018, nilai variabel hak memilih dan dipilih pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Peningkatan nilai pada variabel ini disebabkan karena jumlah kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pelanggaran pada Pemilu tahun 2014.



Grafik 3.7
Perkembangan Variabel Hak Memilih dan Dipilih Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

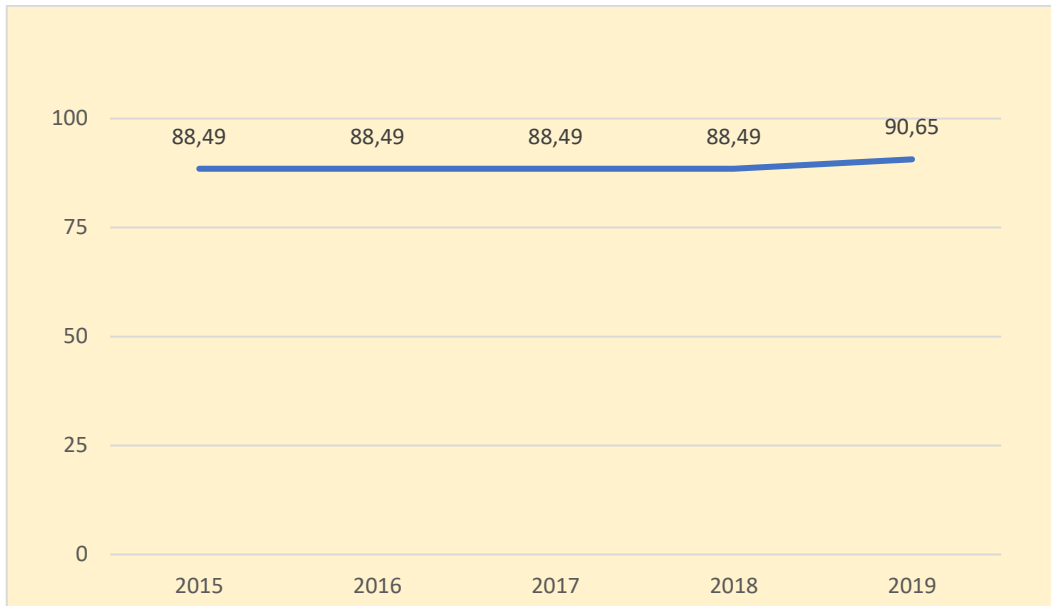
Selama periode tahun 2015-2019, nilai variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019, nilai variabel ini adalah sebesar 42,39 atau mengalami penurunan sebesar 16,83 poin dibandingkan nilai pada tahun 2018. Penurunan pada variabel ini dikarenakan meningkatnya jumlah kejadian demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan serta berkurangnya jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.



Grafik 3.8
Perkembangan Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

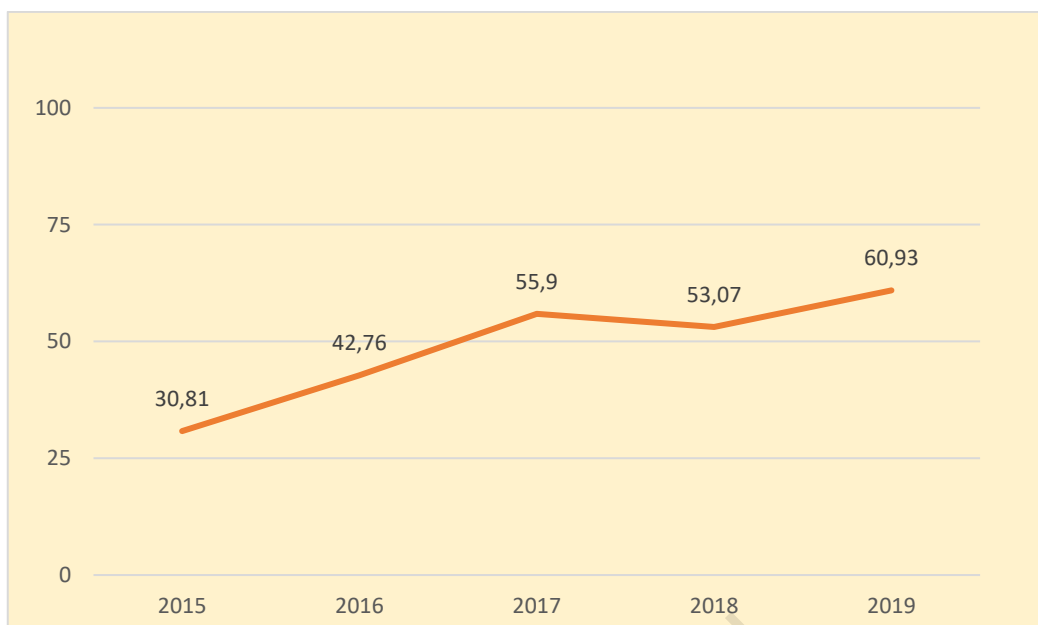
Pada tahun 2019, nilai variabel Pemilu yang bebas dan adil mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2015. Untuk variabel-variabel terkait pemilu, nilainya dihitung lima tahun sekali sesuai dengan jadwal penyelenggaraan Pemilu. Pada tahun 2019, nilai variabel ini adalah sebesar 90,65 atau mengalami peningkatan sebesar 2,16 dibandingkan dengan tahun 2018 dan masih masuk dalam kategori baik. Naiknya nilai pada variabel ini disebabkan karena menurunnya jumlah kejadian atau kasus terkait adanya kecurangan-kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.



Grafik 3.9
Perkembangan Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Peran DPRD

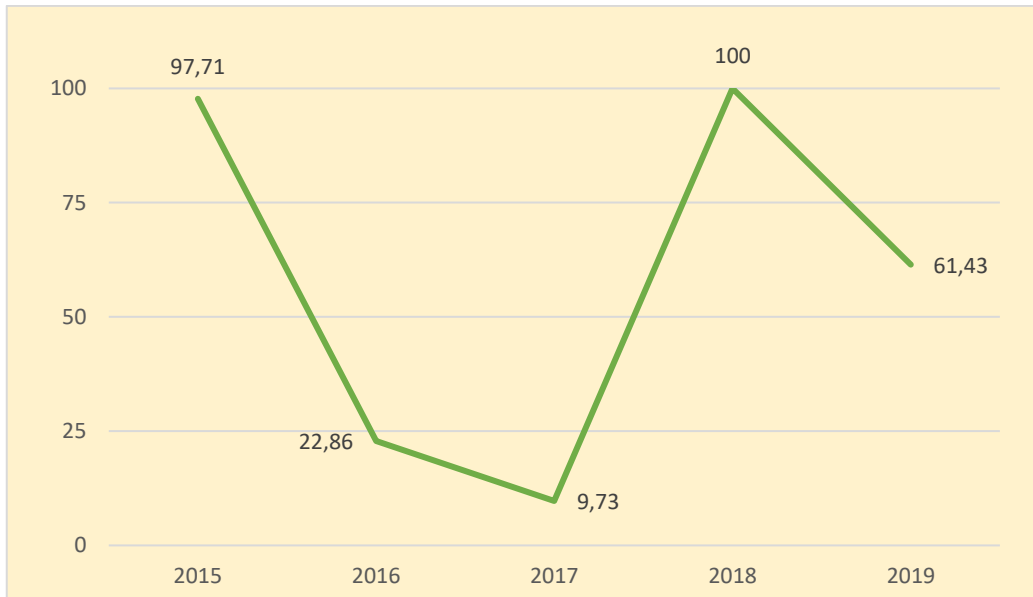
Selama periode tahun 2015-2019, nilai variabel peran DPRD di Sulawesi Utara cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, nilai variabel ini meningkat dari 53,07 di tahun 2018 menjadi 60,93 di tahun 2019 atau meningkat sebesar 7,86 poin. Peningkatan pada variabel ini membuat variabel peran DPRD masuk menjadi kategori “Sedang” setelah selama beberapa tahun sebelumnya nilai selalu masuk dalam kategori “Buruk”. Peningkatan nilai pada variabel ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam persentase anggaran pendidikan dan kesehatan dimana DPRD berperan dalam menentukan besaran alokasi anggaran untuk kedua bidang tersebut.



Grafik 3.10
Perkembangan Variabel Peran DPRD Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Peran Partai Politik

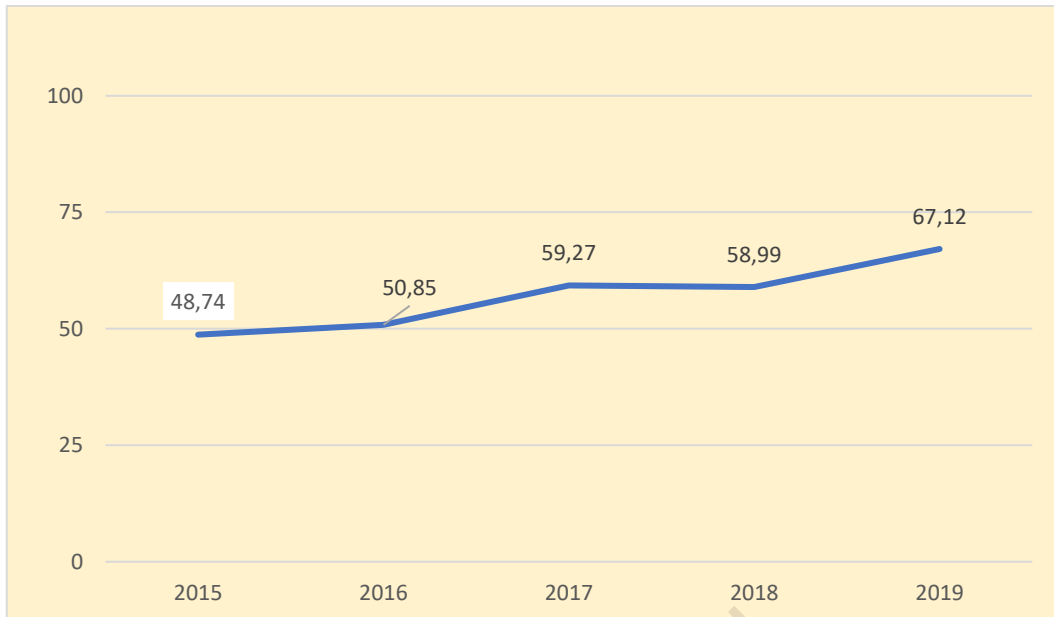
Sepanjang tahun 2015-2019, nilai pada variabel peran partai politik terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, nilai variabel ini mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari nilai 100,00 pada tahun 2018 turun sebesar 38,57 poin menjadi 61,43 pada tahun 2019. Penurunan pada variabel ini disebabkan karena berkurangnya jumlah kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan oleh para partai politik di Sulawesi Utara.



Grafik 3.11
Perkembangan Variabel Peran Partai Politik Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

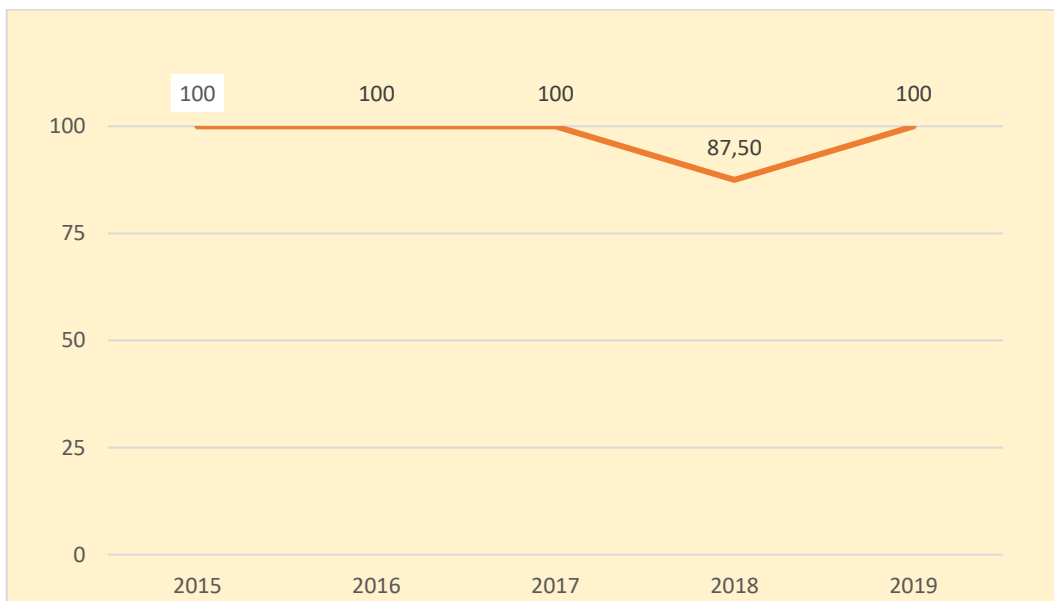
Selama periode tahun 2015-2019, nilai variabel peran birokrasi pemerintah terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan tahun 2018, nilai variabel ini meningkat sebesar 8,13 poin yaitu dari 58,99 menjadi 67,12 dan menempatkan variabel peran birokrasi pemerintah masuk dalam kategori “Sedang” setelah selama tahun-tahun sebelumnya variabel ini masuk dalam kategori “Buruk”. Peningkatan pada variabel ini disebabkan karena adanya peningkatan transparansi informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN jumlahnya juga berkurang.



Grafik 3.12
Perkembangan Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, 2015-2019

Variabel Peran Peradilan yang Independen

Pada tahun 2019, nilai variabel ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari 87,50 menjadi 100,00. Selama tahun 2015-2019, nilai variabel ini selalu berada dalam kategori “Baik”. Peningkatan ini disebabkan karena tidak ada kasus terkait keputusan hakim yang kontroversial maupun penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.



Grafik 3.13
Perkembangan Variabel Peran Peradilan yang Independen Sulawesi Utara, 2015-2019

3.4 PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR IDI SULAWESI UTARA

Pada IDI 2019 terdapat 21 dari 28 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu 10 indikator dari aspek Kebebasan Sipil, 4 indikator (dari 7 indikator) pada Aspek Hak-hak Politik, dan 7 indikator (dari 11 indikator) dari aspek Lembaga Demokrasi. Dari segi jumlah indikator yang berkategori “baik”, terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2018 yang sebanyak 15 indikator. Namun pada tahun 2019 juga masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu, upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik, sehingga dapat mendongkrak aspek-aspek IDI Sulawesi Utara.

Pada tahun 2019 terdapat sembilan indikator yang mencapai skor sempurna atau 100, yang tersebar di ketiga aspek IDI. Indikator yang mencapai skor sempurna tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. Disamping itu, ada satu indikator yang memiliki skor 0 (nol). Indikator tersebut adalah perda yang merupakan inisiatif DPRD. Hal ini tentu turut mendorong penurunan nilai variabel, aspek, dan IDI Sulawesi Utara secara umum.

Tabel 3.1
Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Utara, 2015-2019

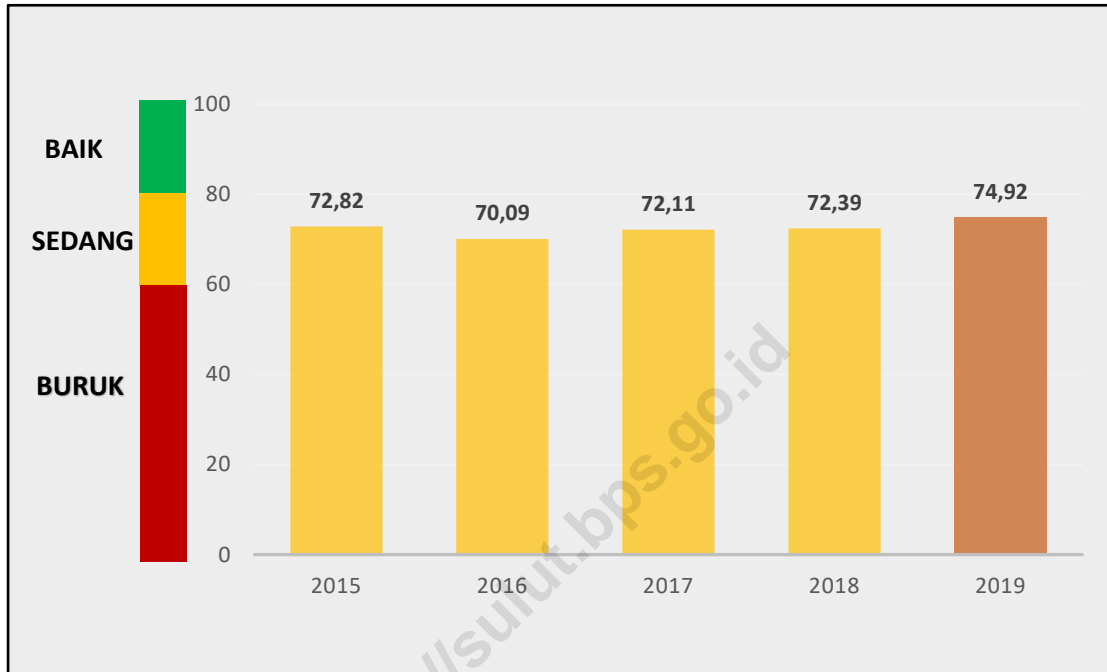
No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kebebasan Sipil						
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100.00	100.00	62.50	100.00	100.00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100.00	100.00	56.25	100.00	100.00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	16.67	87.50	62.50	70.83	100.00
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0.00	25.00	100.00	0.00	100.00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100.00	100.00	100.00	95.65	95.65
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	90.63	100.00	90.63	53.13	90.63
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100.00	100.00	87.50	87.50	87.50
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Hak-Hak Politik						
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	95.51	95.51	95.51	95.51	97.44
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60.00	60.00	60.00	60.00	95.51
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	74.07	74.07	74.07	74.07	76.68
14	Voters turnout	77.83	77.83	77.83	77.83	83.31

15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	81.48	100.00	100.00	100.00	96.30
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	55.43	71.74	80.43	64.13	63.04
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100.00	50.28	48.39	54.31	21.74
Lembaga Demokrasi						
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	90.91	90.91	90.91	90.91	86.36
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	86.08	86.08	86.08	86.08	94.94
20	Alokasi anggaran pendidikan dan/ alokasi anggaran kesehatan	45.75	88.01	83.82	79.52	91.45
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100.00	14.29	0.00	100.00	57.14
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	77.13	100.00	97.32	100.00	100.00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	86.84	51.58	100.00	89.47	97.37
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	16.67	25.00	25.00	33.33	41.66
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100.00	100.00	100.00	75.00	100.00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BAB IV

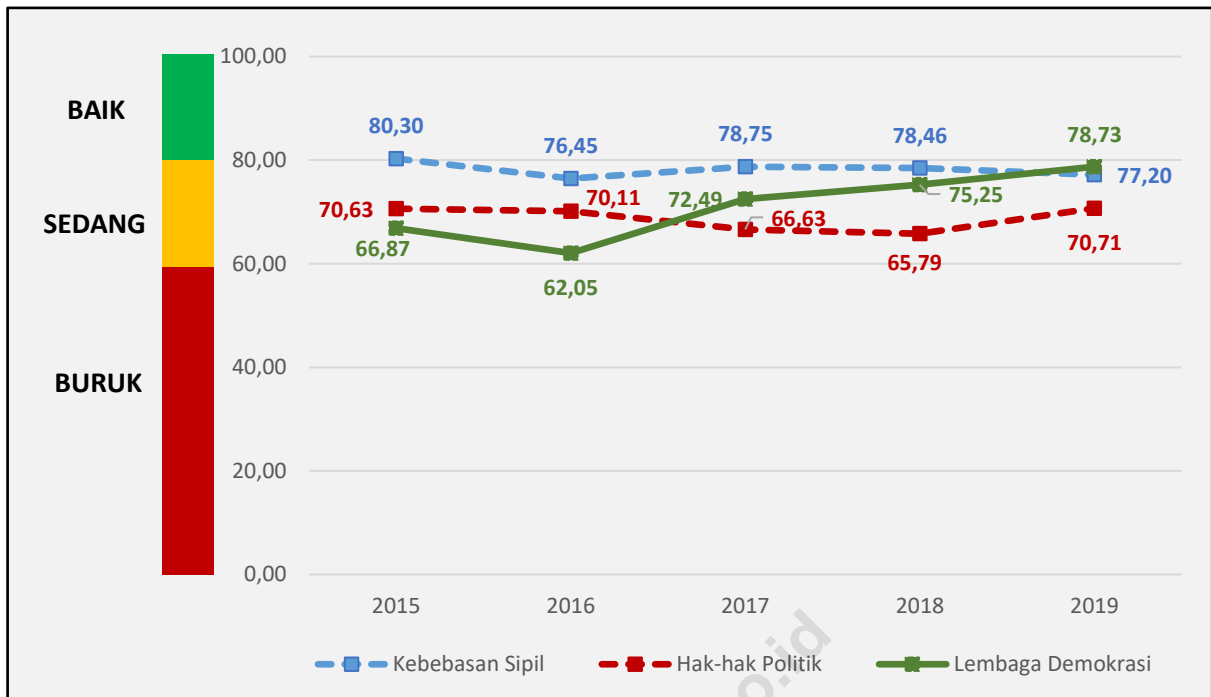
PERBANDINGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA ANTAR PROVINSI DI INDONESIA, 2015-2019

4.1 GAMBARAN UMUM IDI INDONESIA



Grafik 4.1
Perkembangan IDI Nasional, 2015-2019

Pada tahun 2019 skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional sebesar 74,92. Angka ini mengalami peningkatan (2,53 poin) dibandingkan IDI 2018 yang sebesar 72,39. Perubahan angka IDI pada periode 2018-2019 dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 1,26 poin (dari 78,46 menjadi 77,20), kenaikan aspek hak-hak politik sebesar 4,92 poin (dari 65,79 menjadi 70,71), dan peningkatan aspek Lembaga demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73). Dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Indonesia masih berada dalam kategori “sedang”.



Grafik 4.2
Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2015-2019

Pada periode 2018–2019, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik” meningkat dari 5 provinsi menjadi 7 provinsi. Terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori “buruk”, yaitu Provinsi Papua Barat, sementara 26 provinsi lainnya berada pada kategori “sedang”. Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 88,29; diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai IDI sebesar 83,45. Posisi ketiga adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai IDI sebesar 81,64. Posisi keempat ditempati oleh Provinsi Bali dengan capaian IDI sebesar 81,38.

Dibandingkan dengan capaian IDI pada tahun 2018, terdapat 21 provinsi mengalami peningkatan dan 13 provinsi mengalami penurunan angka IDI di tahun 2019 ini. Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Bengkulu, masing-masing meningkat sebesar 9,89 poin dan 8,08 poin. Sementara, dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Maluku, masing-masing menurun sebesar 9,11 poin dan 7,29 poin. Selain itu, Provinsi yang juga mengalami

penurunan nilai IDI adalah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu turun 0,69 poin dari 77,77 pada 2018 menjadi 77,08 pada 2019.

4.2 PERBANDINGAN IDI ANTAR PROVINSI

Nilai IDI Sulawesi Utara tahun 2019 berada di atas nilai IDI nasional. Nilai IDI Sulawesi Utara yang sebesar 77,08 pada tahun 2019 menempatkan Sulawesi Utara pada urutan ke-18 secara Nasional. Padahal dilihat pada tahun 2018, IDI Sulawesi Utara berada di urutan ke-9 dengan nilai IDI sebesar 77,77. DKI Jakarta menempati peringkat pertama dengan nilai IDI mencapai 88,29 dan Papua Barat menempati peringkat terakhir dengan nilai IDI sebesar 57,62. Kisaran skor yang cukup jauh antara yang tertinggi dan terendah dapat mengindikasikan kondisi demokrasi yang cukup beragam antarprovinsi. Ditambah lagi, keragaman ini sekaligus dapat menunjukkan kesenjangan tingkat demokrasi yang lebar antarprovinsi.

Jika dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, maka IDI Sulawesi Utara berada di urutan ketiga, setelah Sulawesi Barat (77,42) dan Sulawesi Tengah (77,27). Kemudian diikuti oleh Gorontalo (76,29), Sulawesi Selatan (70,58), dan di urutan terakhir adalah Sulawesi Tenggara (65,21). Seluruh provinsi di Pulau Sulawesi ini memiliki kinerja demokrasi berkategori “sedang”.

Tabel 4.1
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2018-2019

Provinsi	IDI 2018				IDI 2019			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Aceh	79.97	96.79	68.09	77.67	78.00	93.28	65.22	79.08
Sumatera Utara	64.33	76.54	62.61	51.69	67.65	72.54	61.59	71.12
Sumatera Barat	67.06	55.32	62.84	88.52	67.69	56.58	61.06	92.21
Riau	77.59	86.88	62.77	89.47	75.21	85.15	61.68	84.19
Jambi	68.71	72.88	62.76	72.92	69.76	76.67	64.63	69.21
Sumatera Selatan	77.14	83.13	73.12	76.01	78.96	80.54	81.95	72.23
Bengkulu	70.71	78.77	62.18	74.13	78.79	93.98	73.17	68.63
Lampung	68.67	77.29	59.53	72.35	72.56	78.46	63.70	79.22
Kep Bangka Belitung	73.43	80.95	73.56	63.76	76.75	84.12	71.71	75.48
Kepulauan Riau	79.19	91.05	77.54	66.90	81.64	92.66	78.30	73.10
DKI Jakarta	85.08	95.09	75.43	87.82	88.29	91.01	83.86	91.89
Jawa Barat	65.50	74.90	64.78	54.80	69.09	65.16	71.15	70.75
Jawa Tengah	72.17	76.21	66.92	75.42	77.22	78.43	67.91	90.50
DI Yogyakarta	80.82	90.60	75.07	77.66	80.67	92.90	72.51	78.25
Jawa Timur	72.86	77.21	67.45	75.97	77.68	72.14	80.25	80.55
Banten	73.78	86.59	60.11	79.40	72.60	83.83	60.29	78.01
Bali	82.37	94.72	68.08	89.55	81.38	90.60	68.38	90.42
Nusa Tenggara Barat	73.63	78.28	62.08	86.11	76.64	78.36	66.14	91.16
Nusa Tenggara Timur	82.32	94.00	71.85	84.28	81.02	93.97	78.58	68.62
Kalimantan Barat	76.14	93.87	64.01	73.08	77.66	92.59	71.45	68.74
Kalimantan Tengah	71.27	90.09	50.46	80.65	81.16	86.31	78.24	79.32
Kalimantan Selatan	79.92	69.26	83.03	88.37	79.47	68.01	86.52	82.67
Kalimantan Timur	73.88	90.99	61.38	72.22	77.67	88.50	66.27	82.17
Kalimantan Utara	81.07	97.36	75.80	68.95	83.45	96.60	74.92	80.46
Sulawesi Utara	77.77	88.90	69.53	76.86	77.08	95.19	63.54	75.82
Sulawesi Tengah	75.29	91.90	54.94	86.72	77.27	96.19	53.21	91.68
Sulawesi Selatan	70.88	72.44	64.05	79.75	70.58	68.32	65.61	81.34
Sulawesi Tenggara	74.32	79.77	67.59	78.16	65.21	80.31	52.18	66.90
Gorontalo	72.59	79.33	64.95	76.26	76.29	75.17	76.93	76.70
Sulawesi Barat	71.46	87.41	55.05	77.45	77.42	81.58	70.22	83.60
Maluku	75.51	81.38	72.86	72.32	68.22	87.06	55.62	64.55
Maluku Utara	72.10	78.94	62.39	78.92	69.89	85.61	64.86	58.11
Papua Barat	58.29	82.11	40.11	57.21	57.62	70.35	50.31	53.23
Papua	62.20	84.36	47.90	57.05	65.25	93.08	51.16	52.61
INDONESIA	72.39	78.46	65.79	75.25	74.92	77.20	70.71	78.73



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara**

Jl. 17 Agustus Manado, 95119

Telp.(0431)847044, Fax:(0431)862204

Email:bps7100@bps.go.id, Website:https://sulut.bps.go.id

ISBN 978-602-5673-49-8



9 786025 673498